



Tujuh Desa Belum Serahkan SPJ

PUTUSSIBAU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalbar membeberkan ada tujuh desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang ternyata belum menyelesaikan pelaporan pemanfaatan Dana Desa (DD) tahun 2016. BPK menegaskan bahwa mereka masih menunggu penyelesaian pelaporan tersebut.

"Tahun 2016 ada tujuh kades belum serahkan SPJ-nya. Tahun 2017 mudah-mudahan sudah selesai semuanya," ungkap Ani Pratiwi, salah satu pejabat BPK Provinsi Kalbar, di Putussibau, Rabu (28/3).

Wewenang BPK, ditegaskan dia, sudah jelas berdasarkan undang-undang, yakni memeriksa dana dari keuangan negara. BPK, dikatakan dia, bisa menentukan objek pemeriksaannya, seperti dana desa karena bagian dari keuangan negara. "Jadi BPK berwenang memeriksa keuangan desa," tegasnya.

BPK sendiri, dijelaskan dia,

memiliki tiga jenis pemeriksaan. Pertama, disebutkan dia, pemeriksaan laporan keuangan setiap awal tahun dari pemda seluruh Indonesia termasuk Kapuas Hulu. Saat ini, diungkapkan dia bahwa Pemkab Kapuas Hulu baru dilakukan pemeriksaan pendahuluan, di mana nanti akan ada opini yang diberikan bila sudah selesai diperiksa.

"Dari 2013 sampai 2016 Kapuas Hulu masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun ini semoga bisa naik jadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan ini baru kita tahu dari laporan tahun 2017," ujar Ani.

Kedua, lanjut Ani, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ini, dijelaskan dia, sifatnya lebih mendalam, di mana bisa juga nanti masuk di keuangan desa. "Ketiga pemeriksa kinerja, di mana pemeriksaan ini detail mulai dari perencanaan, program, dan realisasi serta efektifitas program." (aan)